

ABSTRAK

Sebagai salah satu kawasan konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, Afghanistan masih mengalami peperangan dan konflik. Dimulai dari Invasi Amerika Serikat (AS) ke Afghanistan setelah serangan 11 September 2001, perang yang awalnya untuk membongkar jaringan kelompok teroris Al-Qaeda, yang diyakini memiliki basis operasi di Afghanistan ini telah berkembang menjadi perang terbuka berskala besar. Sebagai bagian dari upaya pencegahan perang untuk memakan korban dan meluas ke daerah-daerah sipil, PBB membentuk operasi perdamaian United Nations Assistance Mission in Afghanistan atau UNAMA, yang berfokus untuk mempertahankan situasi Afghanistan yang kondusif di luar kawasan medan perang, serta mengawal pembangunan infrastruktur sipil. Di satu sisi, UNAMA sebagai satu bentuk operasi perdamaian membutuhkan jumlah personel yang besar, dan di sisi lain, PBB kenyataannya tidak memiliki jumlah pasukan perdamaian yang cukup untuk dikerahkan di daerah operasi perdamaannya yang tidak hanya terletak di Afghanistan saja. Terbukti, PBB ternyata menggunakan Private Military and Security Companies atau PMSCs yang menyediakan jasa dan peralatan keamanan yang bisa memastikan UNAMA sukses di Afghanistan. Ini yang kemudian menjadi fokus analisis penulis dalam penelitian kali ini. Penulis berargumen bahwa ada dua alasan utama PBB menggunakan PMSCs di UNAMA. Alasan pertama adalah kebutuhan personel untuk UNAMA yang tidak bisa dipenuhi oleh negara-negara anggota PBB akibat pasokan personel dan SDM yang kurang. Alasan kedua adalah belum adanya kerangka hukum yang secara jelas mengelola PMSCs sebagai entitas multidimensi di dalam aspek keamanan. PMSCs sebagai entitas bisnis dalam perkembangannya tidak hanya sekedar menyediakan personel, tetapi juga jasa keamanan logistik hingga penyadapan.

Kata Kunci: Afghanistan, PMSCs, PBB, UNAMA, Aktor non-negara